

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua Harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Namun, pada praktiknya kurator sering kali mendapatkan masalah dalam melakukan pemberesan harta pailit, salah satunya dalam eksekusi benda yang dijadikan jaminan oleh debitor pailit adalah milik pihak ke-3(Tiga) yang sedang dalam pailit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai hak Penanggung dan Debitor dari Penyelesaian Yuridis Apabila Terjadi Harta Benda Dari Debitor Pailit Juga Dijadikan Boedel Pailit Pada Perkara Lain Karena Menjadi Jaminan Hutang Sepertihalnya yang terjadi dalam Perkara Putusan Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam eksekusi harta kebendaan milik pihak ketiga dalam UUKPKPU memang tidak diatur secara spesifik. Namun, pada dasarnya hak kebendaan milik Penanggung dalam KUHPER dapat dieksekusi apabila debitur yang ditanggung sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu apabila debitor dinyatakan dalam keadaan pailit, maka debitor pailit tersebut telah dinyatakan dia wanprestasi dan seluruh hak kebendaannya termasuk segala jaminan kebendaannya dapat di eksekusi untuk pemberesan. Oleh karena itu, apabila terjadi kepailitan maka kurator dapat mengeksekusi hak jaminan tersebut baik ada atau tidaknya hak istimewa penanggung.

kata kunci; kepailitan, penanggungan, jaminan penanggung, eksekusi, kurator

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and management is carried out by a curator under the supervision of a supervisory judge in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations. However, in practice, curators often encounter problems in managing bankruptcy assets, one of which is in the execution of objects used as collateral by bankrupt debtors belonging to third parties who are in bankruptcy.

This study aims to examine and analyze the regulation of the rights of insurers and debtors in legal settlements when the assets of a bankrupt debtor are simultaneously included in a bankruptcy estate in a separate case due to their use as debt collateral, as illustrated in Case No. 1472 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2021.

The research employs a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. It is carried out through a literature study, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the execution of property owned by third parties in UUKPKPU is not specifically regulated. However, basically the property rights of the insurer in the ICCPR can be executed if the insured debtor is unable to fulfill his obligations. Then, if the debtor is declared bankrupt, the bankrupt debtor has been declared in default and all of his property rights, including all of his property guarantees, can be executed for administration. Therefore, in the event of bankruptcy, the curator can execute the security right whether or not there is an insurer's privilege.

Keywords: *Bankruptcy, guarantor, Properties guarantee, execution, Curator*